

Radio Komunitas untuk Pemberdayaan Perempuan

Community Radio for Women Empowerment

Ressi Dwiana

S2 Ilmu Komunikasi Fisipol UGM dan Program ISB UGM-UiA
Jalan Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta
e-mail : ressidwiana@yahoo.com

Hermin Indah Wahyuni

Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol UGM
Jalan Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta
e-mail : hermink12@yahoo.com

Naskah diterima: 6 September 2013, direvisi: 22 November 2013, disetujui: 29 November 2013

Abstrak

Lahirnya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memberi peluang bagi masyarakat marginal untuk menggunakan frekuensi penyiaran sebagai alat untuk memperkuat kelompoknya seperti dilakukan oleh organisasi perempuan Hapsari di Deli Serdang, Sumatera Utara. Organisasi ini mendirikan radio *Hapsari FM* sebagai media untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Penelitian dengan metode studi kasus ini bertujuan mengetahui empat aspek terkait, yaitu proses pendirian radio, struktur organisasi, program dan programing, serta relasinya dengan komunitas dan *stakeholder*. Hasil riset menunjukkan bahwa proses pendirian *Hapsari FM* terkendala oleh kurangnya profesionalisme aparat negara sehingga cenderung mempersulit dan berpotensi menekan keberadaan *Hapsari FM* melalui celah-celah regulasi. Dalam operasionalisasi siaran radio tersebut terkendala oleh rendahnya kapasitas SDM sehingga radio tersebut tidak maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan. Minimnya kualitas SDM menyebabkan porsi waktu untuk siaran penguatan perempuan sangat sedikit sehingga radio tersebut lebih banyak menyiarkan acara hiburan. Akibatnya komunitas perempuan tidak mampu membangun sikap profesional dalam bermedia.

Kata kunci: radio komunitas, pemberdayaan perempuan, *hapsari fm*

Abstract

The enactment of Law No. 32/2002 on Broadcasting has provided opportunities for marginal community to use radio frequency as a means to reinforce their group as shown by a women's organisation, Hapsari, in Deli Serdang, North Sumatera. This organisation set up Hapsari FM Radio as a medium in voicing women's interests. This case-based study aims to discover four related aspects: radio establishment process, organisation structure, program and programming, and its relationship with community and stakeholders. The result shows that the establishment process is obstructed by the unprofessional conduct of civil servants that they

tend to complicate and potentially destabilise the existence of Hapsari FM through legal loopholes. The operating practice of the radio is constrained by unskilled human resources, hence it can not give maximum contribution to women empowerment. The low quality of human resource has led to very little time allotment for women reinforcing program so that it largely broadcasts entertainment programmes. Consequently, women community are not capable of building professional attitude in mediated communication.

Keywords: *community radio, women empowerment, hapsari fm*

PENDAHULUAN

Radio komunitas adalah salah satu bentuk lembaga penyiaran yang dilegalkan keberadaannya dalam UU No. 32 tahun 2002. Media komunitas berkembang cukup pesat. Data dari Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) 2012, ada sekitar 700 stasiun radio komunitas yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia (Gunawan dalam Seneviratne, 2012).

Hal tersebut terjadi karena ada banyak keunggulan radio komunitas dibanding media *mainstream*. Pertama, radio komunitas mampu memenuhi kebutuhan spesifik dari kelompok masyarakat yang membentuknya. Kedua, dapat memenuhi hak informasi dan komunikasi dari kelompok marjinal, seperti perempuan, buruh, nelayan, dan kaum miskin kota. Ketiga, radio komunitas dapat mengatasi masalah keterbatasan jangkauan media *mainstream* yang terpusat hanya di kota-kota besar.

Potensi tersebut dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk menjadi alat reformasi di segala bidang, yang menempatkan media di posisi sentral sebagai pusat informasi dan komunikasi. Di beberapa daerah di Indonesia, berbagai permasalahan, mulai yang berkaitan dengan mitigasi bencana, penyelesaian konflik horizontal, sampai masalah transparansi keuangan, diselesaikan melalui medium radio komunitas (Nasir, 2007; Tripambudi, 2011).

Besarnya harapan terhadap radio komunitas mendorong banyak pihak memberikan dukungan terhadap keberadaan media tersebut. Di banyak negara Asia dan Afrika, lembaga-lembaga donor memberikan bantuan pendirian radio komunitas, baik

langsung ke komunitas atau melalui pemerintah (Tabing dalam Boafu, 2000; Fraser dan Estrada, 2001). Hal tersebut dilakukan karena media komunitas dianggap ampuh untuk memperkuat dan menyelesaikan masalah masyarakat. Keberadaan media komunitas bahkan dianggap sama pentingnya dengan program-program lainnya, seperti pendidikan dan penguatan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat terpencil dan marjinal.

Perempuan adalah salah satu kelompok masyarakat yang paling sering terabaikan. Di banyak bidang kehidupan, kepentingan perempuan tidak diakomodir oleh para pemangku kepentingan, termasuk dalam bidang media yang kerap mendiskriminasi kaum wanita.

Salah satu model penguatan perempuan yang sering dipergunakan adalah melalui media. Di Sumatera Utara, sebuah lembaga penguatan perempuan, Hapsari, mendirikan radio komunitas sebagai salah satu strategi pemberdayaan perempuan. Radio komunitas *Hapsari FM* bersiaran di frekuensi 107,8 FM dan berlokasi di Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Radio ini mulai mengudara pada Maret 2009.

Namun, penggunaan media komunitas tidak selalu berjalan mulus. Secara umum, ada dua permasalahan utama yang membuat radio komunitas sulit berkembang. **Pertama**, minimnya jumlah frekuensi dan sulitnya pengurusan perizinan. **Kedua**, masalah keuangan dan SDM yang mempengaruhi keberlanjutan radio komunitas. Kedua masalah tersebut memiliki efek turunan dalam implementasi program radio

komunitas. Pada kasus *Hapsari FM*, persoalan-persoalan tersebut menjadi tantangan yang berat karena misi pemberdayaan perempuan yang diembannya harus tetap dijalankan, baik melalui program *on air* maupun *off air*.

Pemahaman tentang radio komunitas terutama didasarkan pada definisi komunitas. Ada dua pendapat tentang komunitas. Di dalam UU No. 32 Tahun 2002, komunitas dibatasi hanya pada masalah geografis. Hal ini tertulis pada Pasal 20 ayat (1) yang menyebut bahwa radio komunitas memiliki luas jangkauan wilayah yang terbatas. Sementara beberapa pendapat menyatakan bahwa komunitas tidak terbatas hanya pada masalah geografis. Gazali (dalam Rachmiate, 2007) mendefinisikan radio komunitas sebagai lembaga penyiaran yang didirikan untuk melayani komunitas tertentu, baik dalam konteks batasan geografis maupun dalam konteks rasa identitas atau minat yang sama. Sepaham dengan Gazali, Sudibyo (2004) merumuskan tiga jenis batasan komunitas, yaitu berdasarkan geografis, kesamaan identitas, dan kesamaan minat, kepedulian, dan kepentingan.

Perbedaan kedua definisi ini berpengaruh pada pandangan terhadap model penyelenggaraan media komunitas. Ada yang fokus berdasarkan batasan geografis, misal radio-radio komunitas desa. Ada pula yang berbasis isu, seperti radio *Hapsari FM*. Secara empiris, keberadaan radio komunitas, baik yang berbasis geografis maupun isu, ada dan dapat memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, tetapi jangkauan siarannya dibatasi radius 2,5 km dengan kekuatan pemancar maksimum 50 watt (PP No. 51 tahun 2005).

Dari definisi komunitas tersebut, penyelenggaraan penyiaran radio dirujuk. Dari segi isi, menurut Sudibyo (2004), muatan radio komunitas sebagian besar tentang dinamika dan kebutuhan komunitas itu sendiri. Sementara pada kebijakan keuangan, radio komunitas menolak beriklan dan lebih mengutamakan pengumpulan dana dari komunitas, donasi, atau bantuan sosial (Lewis

dalam Jankowski dan Prehn, 2002).

Penggunaan media sebagai alat untuk pemberdayaan perempuan tidak dapat dilepaskan dari masalah ketidaksetaraan gender. Di Indonesia, perempuan ditempatkan sebagai objek dari kekuasaan, termasuk dalam bentuk kebijakan negara. Selanjutnya, apa yang menjadi kebijakan negara, tercermin pula dalam penggambaran perempuan dalam media.

Tersingkirnya perempuan dari berbagai kegiatan publik menghasilkan suatu kondisi yang menempatkan perempuan diputus dari arus utama (Daly dan Saraceno dalam Hobson, Lewis, dan Siim, 2002). Penyingkiran kaum perempuan, terutama di berbagai sektor publik, termasuk bidang politik, mendapatkan momen titik balik ketika berbagai kebijakan internasional mengesahkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia pada 1993 di Wina secara khusus mengakui hak asasi kaum perempuan dan kewajiban negara untuk melindungi serta memajukannya (Mulia, 2008). Namun, perjuangan untuk kesetaraan gender tidak berhasil jika hanya menitikberatkan pada perubahan kebijakan. Tantangan yang terbesar adalah pembedaan sosial antara laki-laki dan perempuan, hal mana perempuan masih tetap terikat pada berbagai tugas domestik (Giddens, 1993).

Media komunitas menawarkan alternatif, bukan saja untuk memberikan gambaran perempuan yang tidak bias gender, tetapi juga memungkinkan perempuan meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan, dan pelatihan dalam bidang radio. Menurut Mitchell (dalam Jankowski dan Prehn, 2002), medium alternatif ini penting karena berguna untuk mempromosikan ide, praktik, konten feminis, dan melawan apa yang disebut sebagai "pemusnahan simbolik" perempuan yang disebabkan oleh kurangnya atau kesalahan penggambaran perempuan oleh media. Menurut *The World Association of Community Broadcaster/AMARC*, ada empat

dampak sosial yang dihasilkan oleh radio komunitas di 927 radio dari seluruh dunia, salah satunya adalah efektif untuk memberdayakan perempuan (Kar dalam Seneviratne, 2012).

Pemberdayaan perempuan melalui radio komunitas diwujudkan melalui banyak cara. Dari segi isi siaran, radio komunitas dapat menyiarkan acara yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Selain itu, bentuk organisasi dan relasi radio komunitas juga dapat menunjukkan bagaimana radio komunitas melakukan pemberdayaan perempuan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka studi ini mengeksplorasi usaha-usaha pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh radio komunitas melalui empat aspek, yaitu aspek pendirian radio komunitas *Hapsari FM*, struktur organisasi radio, program dan programing, serta relasi antara *Hapsari FM* dengan komunitas dan *stakeholder*.

Radio komunitas sebagai elemen penting di dalam usaha pemberdayaan telah menjadi perhatian banyak peneliti komunikasi. *Media dan Perubahan Sosial* adalah disertasi Eni Maryani yang dibukukan dan membahas tentang radio komunitas Angkringan sebagai bentuk perlawanan masyarakat Desa Timbulharjo, Bantul, Yogyakarta. Riset lainnya adalah disertasi Atie Rachmiation yang diterbitkan dalam buku berjudul *Radio Komunitas (Eskalasi Demokratisasi Komunikasi)* yang memfokuskan studinya pada peran radio komunitas sebagai media alternatif yang dapat meningkatkan demokratisasi komunikasi, khususnya di daerah pedesaan atau di kalangan *grassroot*.

Sebagian besar kajian tentang radio komunitas yang berkaitan dengan pemberdayaan, fokus pada satu komunitas secara

geografis. Studi yang dilakukan oleh Tripambudi (2011) fokus pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh radio komunitas di Yogyakarta. Begitu juga dengan *paper* yang disajikan oleh Birowo (2007) yang menjadikan Jaringan Radio Komunitas (JRK) Yogyakarta sebagai fokus tulisan. Salah satu studi yang berbasis pada isu adalah riset tentang radio komunitas Epiginosko di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara (Sitompul, 2009) yang membahas pemberdayaan masyarakat pedagang pasar. Sementara untuk isu pemberdayaan perempuan melalui radio komunitas masih merupakan tema yang masih jarang dikaji. Tulisan ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang radio komunitas, baik dalam konteks geografis (radio komunitas di Sumatera Utara), maupun dalam konteks isu (pemberdayaan perempuan melalui radio komunitas).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena kemampuan pendekatan tersebut untuk mempelajari fenomena kultural dan sosial pada kejadian dan setting yang sebenarnya (Stake dalam Denzin dan Lincoln, 1994). Oleh karena itu, studi kasus mengakomodir kebutuhan untuk mempelajari langsung fenomena tersebut pada keadaan alaminya.

Radio *Hapsari FM* dipilih sebagai kasus yang akan dipelajari karena radio tersebut merupakan satu-satunya radio komunitas yang fokus pada isu pemberdayaan perempuan di Sumatera Utara. Selain itu, dari beberapa lembaga pemberdayaan perempuan, hanya Hapsari yang menggunakan radio komunitas sebagai media mereka.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan Internal		Informan Eksternal	
	Jabatan	Fungsi	Jabatan	Fungsi
1	Ketua Dewan Eksekutif Hapsari	Menjelaskan alasan dan proses pembentukan <i>Hapsari FM</i> serta kebijakan Hapsari terhadap radio tersebut.	KPID Sumut	Memaparkan fungsi dan kontribusi radio komunitas dan regulasi yang mengatur radio komunitas
2	Penanggung Jawab <i>Hapsari FM</i>	Memaparkan berbagai kegiatan <i>Hapsari FM</i> secara eksternal dan internal serta menjelaskan struktur organisasi radio tersebut.	1. Jaringan Radio Komunitas - JRK Sumatera Utara 2. Masyarakat Peduli Media Yogyakarta	Memberikan pendapat terhadap keberadaan <i>Hapsari FM</i> sebagai radio komunitas perempuan.
3	Anggota serikat lembaga Hapsari	Menerangkan kontribusi yang diberikan komunitas untuk radio dan manfaat yang diperoleh komunitas dari <i>Hapsari FM</i> .	Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Deli Serdang	Memaparkan manfaat radio komunitas bagi pemberdayaan perempuan.
4	Staf tetap <i>Hapsari FM</i>	Menjelaskan berbagai rancangan program dan penyiaran <i>Hapsari FM</i> .	Kepolisian Resort Kabupaten Deli Serdang	Memaparkan tentang fungsi radio komunitas dan bentuk kerja sama yang dilakukan dengan <i>Hapsari FM</i> .

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tiga cara, yaitu observasi, studi dokumen, dan wawancara. Hal ini merupakan kekuatan utama dari pendekatan studi kasus sehingga temuan atau konklusi apapun akan lebih meyakinkan dan tepat jika didasarkan pada beberapa sumber informasi yang berlainan (Yin, 2012). Pengumpulan data dilakukan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada April hingga Mei 2013. Untuk proses observasi dilakukan di studio *Hapsari FM* dan lingkungan kantor Hapsari. Pencarian dokumen dilakukan di kantor KPID Sumatera Utara dan studio *Hapsari FM*. Sementara informan yang diwawancarai meliputi internal dan eksternal *Hapsari FM*. Pihak internal yang dimaksud adalah pengelola radio dan perwakilan lembaga Hapsari, dan komunitas perempuan pendengar *Hapsari FM*. Sementara pihak eksternal yang dimaksud meliputi lembaga pemerintahan dan non-pemerin-

tahan yang fokus pada masalah radio komunitas dan *stakeholders Hapsari FM*.

Analisis data pada penelitian ini, dilakukan dengan mengumpulkan temuan-temuan di lapangan. Data tersebut dianalisis berdasarkan empat kategori yang diajukan, yaitu pendirian radio, struktur organisasi radio, program dan programing acara, serta relasi dengan komunitas dan *stakeholder* lainnya. Data yang sudah dikelompokkan berdasarkan empat kategori tersebut, dikaji menggunakan teori yang dipergunakan untuk membangun dasar pemikiran dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendirian Radio

Persoalan utama bagi kelompok perempuan adalah ketidaksetaraan gender. Permasalahan ini berakar kuat di masyarakat sehingga membutuhkan strategi penyelesaian

yang integral dan media dianggap sebagai bagian yang sangat esensial. Media dianggap mampu menyelesaikan persoalan ketidaksetaraan gender dengan menggaungkan semangat pemberdayaan melalui isi media. Namun, bukan hanya melalui konten, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bermedia. Itu artinya, media perempuan, bukan saja mampu menyebarkan ide-ide kesetaraan gender, tetapi juga secara nyata memberdayakan perempuan pelaku media.

Untuk dapat menggunakan media, perempuan dihadapkan pada permasalahan

tersebut. Berdirinya Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan merupakan dampak dari tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa, dalam kerusuhan Mei 1998 di beberapa kota di Indonesia (<http://www.komnasperempuan.or.id/about/profil/>, diakses pada 16 Juli 2013).

Setelah berdiri pada 1998, Komnas Perempuan sejak 2001 melaporkan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang terdeteksi oleh lembaga-lembaga mitra di berbagai daerah di Indonesia. Berikut ini jumlah kekerasan terhadap perempuan yang tercatat sejak 2001-2011.

Tabel 2. Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
3169	5163	7787	14020	20391	22512	25522	54425	143386	105103	109107

Sumber: komnasperempuan.or.id

akses. Memang tersedia banyak pilihan media yang dapat dipergunakan, tetapi hingga kini, radio masih dianggap yang paling tepat, terutama untuk perempuan desa dengan tingkat literasi dan perekonomian yang relatif rendah. Kemunculan media komunitas perempuan merupakan bagian dari strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh organisasi perempuan. Sementara, berdirinya organisasi perempuan merupakan akibat dari ketimpangan gender yang terjadi secara terus-menerus di masyarakat.

Secara legal formal, pemerintah Indonesia di masa Orde Baru menunjukkan inisiatif untuk mengakui persamaan hak perempuan. Salah satu buktinya adalah ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Against Women / CEDAW*) menjadi UU No. 7 tahun 1984. Namun, keberadaan peraturan tersebut tidak membawa perubahan yang berarti di dalam sistem sosial Indonesia. Bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dihentikan dengan pemberlakuan UU

Dari keseluruhan jumlah kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan mengidentifikasi sejak 2006 sampai 2010, Pulau Sumatera menempati urutan kedua menyumbang jumlah terbanyak korban kekerasan. Sementara pada laporan kekerasan terhadap perempuan pada 2011, tercatat bahwa Provinsi Sumatera Utara menempati urutan ke-8 tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah 8.277 kasus.

Sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Utara, perempuan di Deli Serdang lebih rentan karena sebagian besar penduduk bertempat tinggal di pedesaan. Perempuan di desa lebih beresiko menjadi korban tindakan kekerasan, terutama kekerasan domestik.

Kekerasan terhadap perempuan tidak saja terjadi dalam dunia nyata. Ketika media memberitakan kasus kekerasan terhadap perempuan secara dangkal dan mengeksploitasi, perempuan kembali mengalami kekerasan tekstual. Ideologi patriarkis inilah yang melatarbelakangi model pemberitaan mengenai mitos-mitos di seputar potret, citra, presentasi, dan representasi wanita yang

mengambil medium media massa dan ditampilkan di ruang publik (Ibrahim dan Suranto, 1998). Hal tersebut membuat ketimpangan gender dilestarikan dan direproduksi dalam realitas media. Oleh karena itulah, bagi kelompok perempuan, mendirikan media alternatif merupakan keharusan karena ruang publik di media massa *mainstream* tidak terbuka untuk mereka.

Berdirinya *Hapsari FM*, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan organisasi Hapsari. Lembaga ini berawal dari sebuah sanggar belajar anak yang dibentuk oleh beberapa perempuan muda di Desa Bingkat, Kecamatan Perbauangan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada awal era 1990-an, sanggar tersebut kerap diundang dalam kegiatan-kegiatan LSM di kota Medan. Kegiatan Hapsari pun kemudian lebih difokuskan ke masalah pemberdayaan perempuan. Setelah hampir seperempat abad, sekarang Hapsari memiliki 10 serikat anggota yang tersebar di Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

Penggunaan media radio oleh Hapsari sudah dilakukan jauh sebelum radio komunitas *Hapsari FM* berdiri. Pada pertengahan dekade 90-an, mereka mengelola sebuah radio swasta yang tidak terurus oleh pemiliknya. Di radio yang bernama *Suara Mitra Remaja* tersebut, dibuat beberapa acara yang mengangkat isu perempuan. Salah satunya, dalam bentuk kuis yang menanyakan kepada pendengar bagaimana gambaran perempuan yang baik. Acara-acara tersebut mendapat tanggapan yang cukup beragam sehingga isu seputar perempuan mulai terangkat di media.

Namun, pada Oktober 1997, radio tersebut dibredel karena tidak memiliki izin siaran. Walaupun siaran berhenti, kegiatan pengorganisasian kelompok perempuan, terus berjalan. Setelah Reformasi 1998, Hapsari mendapat program untuk Pemilu dari *Asia Foundation*. Mereka membuat pemasangan *jingle* iklan tentang perempuan di 30 radio swasta di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara. Kampanye tersebut cukup

sukses dan mengantar pendiri Hapsari, Lely Zailani, didaulat menjadi *fellow Ashoka Foundation* pada tahun 2000. Dari dana tersebut, ia membeli saham sebuah radio AM di kota Lubuk Pakam yang bernama *Tuah Suara Murni* (TSM).

Akan tetapi, saat itu, kecenderungan radio sudah bergeser dari AM ke FM. Bukan hanya permasalahan teknologi yang berubah, tren kehidupan di dunia radio juga sudah berbeda. Pendengar tidak lagi dibangun sebagai sebuah komunitas yang solid bagi stasiun radio, tetapi semata hanya menjadi sasaran penjualan produk sehingga radio tidak lagi bisa dijadikan media pengorganisasian untuk menghimpun massa. Akhirnya, strategi diubah agar radio tetap berguna. Kerja pengorganisasian, diserahkan kepada serikat-serikat anggota. Sementara radio melakukan tugas pemberdayaan. Untuk itu, disusunlah program agar radio menjadi ruang untuk perempuan belajar bicara dan belajar menyampaikan pendapat-pendapatnya. Di buatlah program-program perempuan, yaitu *Ngopi* (Ngobrol Pagi Ini) dan *Beranda* (Berani Bicara Beda).

Selain membangun program untuk penguatan perempuan, TSM juga aktif membangun relasi dengan berbagai lembaga seperti KBR (Kantor Berita Radio) 68 H Jakarta, Unesco, dan Kemenristek. Lembaga-lembaga tersebut memberikan dukungan peralatan radio dan pelatihan peningkatan profesionalisme. Meskipun strategi pemanfaatan radio diubah menjadi media belajar, tetapi kendala teknologi membayangi keberadaan *TSM* karena radio AM sudah semakin sedikit peminatnya. Bahkan di kalangan anggota serikat Hapsari, popularitas *TSM* semakin menurun sehingga dirintis usaha untuk membuat radio di jalur FM. Awalnya, Hapsari ingin mendirikan radio swasta biasa, tetapi saat itu, di kota Lubuk Pakam, frekuensi untuk penyiaran radio komersial sudah tidak tersedia sehingga Hapsari mengajukan izin pendirian radio komunitas.

Dari pengalaman Hapsari, ada dua

permasalahan besar dalam hal pengurusan izin siaran. Pertama, proses untuk mendapatkan izin terasa panjang dan rumit. Pihak komunitas harus bekerja keras, sementara peran KPID terbilang minim. Untuk mengurus perizinan radio, komunitas harus bergerilya mendapatkan format pengajuan yang tepat. Beberapa kali Hapsari harus mengganti proposal karena oleh pihak KPID dianggap kurang sesuai. Proposal tersebut akhirnya lulus dari proses pemberkasan setelah mendapat bantuan dari orang yang pernah menjabat di KPID Sumut. Setelah tahap pemberkasan, Hapsari harus melakukan pendekatan personal dengan salah seorang Komisioner KPID untuk mempermudah proses perizinan. Kedua, perlunya dukungan biaya yang besar dan sistem pemberian "upeti". Proses perizinan yang panjang dan terdiri dari berbagai tahapan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Biaya yang dikeluarkan oleh Hapsari paling besar adalah pada saat Evaluasi Dengar Pendapat (EDP). Namun, di luar dana resmi tersebut, ada banyak dana siluman yang harus dikeluarkan, seperti uang terima kasih kepada pihak KPID yang hadir dalam EDP, amplop untuk pihak Balai Monitoring, dan biaya- lainnya.

Proses yang panjang dan rumit serta biaya cukup besar untuk mendirikan radio komunitas, tidak dialami oleh *Hapsari FM* saja. Masalah perizinan radio komunitas, menjadi isu di hampir setiap daerah. Darmanto (2009) menyebutkan bahwa prosedur pengajuan izin radio komunitas disamakan dengan radio penyiaran swasta sebagai hal yang sangat membebani komunitas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki sumber pendanaan kuat.

Dari pengalaman Hapsari ketika mengurus perizinan radio, komunitas tidak terbangun kemampuannya. Mereka harus melakukan pendekatan personal yang pada sisi lain bisa menumbuhkan rasa tidak percaya diri kaum wanita untuk bertindak di ruang publik karena menganggap bahwa tanpa *backing* dari "orang dalam" mereka tidak akan berhasil. Padahal harusnya, melalui

proses perizinan, kelompok perempuan dapat belajar tentang bagaimana menjalani tahapan legal formal dengan kemampuannya sendiri sehingga ketika mereka berhasil melewati prosedur tersebut ada kebanggaan sekaligus keberanian untuk terus maju dan mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman di bidang lainnya.

Struktur Organisasi Radio

Media pemberdayaan perempuan berbeda dengan media komersial dan media publik. Di dalam struktur organisasinya, harus ada representasi perempuan. Hal tersebut terwujud dengan adanya partisipasi perempuan di media komunitas. Keterlibatan perempuan dalam organisasi radio dilihat tidak saja dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas, termasuk dalam hal kepemilikan dan pengambilan keputusan.

Untuk menganalisis struktur organisasi radio komunitas, harus dirujuk terlebih dahulu kepada latar belakang pembentukan media tersebut. Seneviratne (2012) menyebutkan bahwa radio komunitas di Indonesia berkembang di dalam tiga gugusan, yaitu yang dibentuk oleh NGO, dibentuk oleh kelompok kepentingan, dan yang diinisiasi oleh warga lokal terutama masyarakat di dalam satu desa, yang acap kali mendapat bantuan dana dari lembaga donor luar negeri.

Menurut Darmanto (dalam Suranto, 2009) latar belakang pendirian radio komunitas mempengaruhi pola pengorganisasian media yang bersangkutan. Sebagian besar radio komunitas memiliki manajemen yang relatif sederhana. Namun, pada media komunitas yang kelahirannya diinisiasi oleh LSM cenderung memiliki pola pengorganisasian yang relatif lebih jelas (Darmanto dalam Suranto, 2009). Radio *Hapsari FM* adalah bentukan Hapsari yang menggunakan model manajemen LSM yang umum berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, radio *Hapsari FM* memiliki pola pengorganisasian berbeda dengan struktur organisasi lembaga Hapsari. Radio dikelola oleh Komisi Kampanye dan

Jaringan. Hapsari sendiri memiliki 3 komisi, yaitu: Komisi Pelayanan dan Penguatan Anggota; Komisi Kampanye dan Jaringan; Komisi III Basis Produksi. Tugas radio adalah mengkampanyekan isu-isu lokal gerakan perempuan yang mendukung gerakan perempuan di level nasional.

Dengan model organisasi yang terpisah, penanggung jawab diberikan hak untuk mengatur internal radio. Sementara untuk menjalin komunikasi dengan lembaga induk, penanggung jawab dapat berkoordinasi dengan Pelaksana Harian Hapsari.

Walaupun secara keorganisasian radio berdiri sendiri, tetapi tidak secara keuangan. Keuangan radio berada di bawah administrasi lembaga Hapsari. Ketergantungan keuangan radio disebabkan oleh dua hal. **Pertama**, secara regulasi radio komunitas tidak diperkenankan menyiarkan iklan komersial. Oleh sebab itu, satu-satunya potensi pemasukan yang bisa diperoleh *Hapsari FM* adalah melalui lembaga Hapsari. **Kedua**, *Hapsari FM* menerapkan sistem penggajian kepada setiap orang yang bekerja di radio dengan kisaran Rp 600,- s.d. Rp 800 ribu per bulan. Model penggajian yang dilakukan oleh *Hapsari FM* tidak terlepas dari sejarah radio yang dulunya radio swasta kemudian berubah menjadi radio komunitas. Pemberian gaji sebenarnya tidak diharamkan. Kar (dalam Seneviratne, 2012) menyebutkan bahwa beberapa radio komunitas memiliki karyawan yang dibayar, tetapi dengan jumlah yang jauh lebih sedikit daripada tenaga sukarela. Menyimpang dari aturan tersebut, radio *Hapsari FM* menggaji seluruh stafnya dan tidak merekrut sukarelawan, bahkan membatasi operasional radio hanya kepada staf yang ditunjuk.

Untuk menyokong keuangan mereka, *Hapsari FM* melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga, terutama instansi pemerintah, untuk iklan layanan masyarakat (ILM). Selain pemasukan dari ILM, radio bisa mendapat dana tambahan dari serikat anggota Hapsari. Jika salah satu serikat ingin

mempublikasikan acara yang mereka selenggarakan melalui radio, mereka harus membayar. Model seperti ini dilakukan untuk mengatasi kebutuhan logistik radio, misalnya jika harus melakukan *live report* dari lokasi acara. Namun, di luar acara khusus, serikat anggota tidak memiliki kewajiban untuk membayar iuran ke radio. Oleh karena warga komunitas tidak wajib membayar iuran untuk radio, maka subsidi diberikan sepenuhnya oleh pihak Hapsari.

Di radio komunitas, keterlibatan komunitas dalam setiap proses dan kegiatan adalah mutlak. Namun, tidak di *Hapsari FM*. Partisipasi komunitas terbatas hanya sebagai narasumber atau partisipan acara radio. Sementara di bidang manajemen, keuangan, atau evaluasi, komunitas tidak terlibat langsung. Hal ini sebenarnya kontras dengan kondisi SDM radio tersebut. Dengan 4 orang staf, *Hapsari FM* cukup kewalahan mengelola radio yang bersiaran selama 16 jam dalam sehari dan 7 hari dalam sepekan.

Walaupun sudah mengadakan rapat internal bulanan untuk pengaturan tugas, sering terjadi kekosongan penyiar radio. Di luar masalah siaran, keahlian SDM juga terbilang minim dan tidak merata. Penanggung jawab radio *Hapsari FM* adalah orang yang paling memahami kerja-kerja teknis, seperti pembuatan *jingle* iklan. Ia pernah mengikuti pelatihan di *School Broadcasting Media* (SBM) yang diselenggarakan oleh KBR 68 H pada 2005. Namun, kemampuan tersebut tidak ditularkan kepada staf yang lain. Penyebabnya adalah tidak tersedianya model peningkatan kapasitas yang dirancang secara reguler. Karena itu, tidak ada waktu yang khusus dialokasikan agar staf radio dapat belajar, baik di luar radio maupun di antara para staf.

Minimnya kapasitas SDM merupakan masalah klasik yang dihadapi setiap radio komunitas. Hal tersebut diakui sebagai salah satu permasalahan penting di dalam radio komunitas di Indonesia (Gunawan dalam Seneviratne, 2012). Koordinator Program Komunikasi *UNESCO* Jakarta, Arya Gunawan

menggambarkan kondisi SDM radio komunitas di Indonesia sebagai berikut:

Sebagian besar staf tidak mengecap pendidikan tinggi, oleh karenanya tidak mudah untuk melibatkan mereka ke dalam pembuatan acara yang berkualitas. Kebanyakan dari mereka hanya menjadi penyiar atau sekadar menjadi *disk jockey* yang memasang lagu sesuai selera mereka atau berdasarkan permintaan pendengar. Tidak banyak stasiun radio yang membuat acara berita atau acara *talk show* secara reguler yang dapat memperkuat demokrasi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah di tingkat daerah.

Dengan kondisi kekurangan kuantitas dan kualitas SDM, sulit untuk membayangkan bahwa radio tersebut akan bertahan di tahun-tahun yang akan datang apalagi untuk menjalankan misi pemberdayaan. Permasalahan organisasi ini, terutama SDM, mempengaruhi produk siaran yang dihasilkan.

Program dan Programing Acara

Dalam program yang dirancang untuk pemberdayaan perempuan, radio komunitas diharapkan dapat menjadi tempat bagi keluarnya semua cerita dari versi perempuan. Berdasarkan misi tersebut, maka program acara yang disiarkan *Hapsari FM* dirancang sedemikian rupa dan diserahkan saat mengajukan permohonan perizinan ke KPID. Dari rancangan semula, program siaran radio Hapsari FM sudah mengalami beberapa perubahan bobot (persentase). Berikut ini format acara *Hapsari FM* dan perubahannya.

Data di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dari acara hiburan. Hal itu terjadi terkait dengan kurangnya SDM yang memicu minimnya siaran bermuatan informasi dan pendidikan. Dari keseluruhan acara *Hapsari FM*, hanya ada 3 mata acara yang masuk ke dalam kategori untuk penguatan perempuan, yaitu:

1. **Ngopi (Ngobrol Pagi Ini)** yang tayang pada Senin dan Sabtu.

Tabel 3. Format Siaran Radio *Hapsari FM*

Format Siaran	Jenis	Persentase (2009)	Persentase (2013)
Musik / hiburan	Pop Indonesia 60% Pop barat 10% Dangdut / etnik 30%	40.00%	60.00%
Informasi / pengetahuan	Siaran berita Dialog radio (talkshow) <i>Game</i> (kuis interaktif) Jumpa pendengar . Jejak perempuan . Suara Perempuan	45.00%	30.00%
Religi	. Lagu kasidah . Ceramah agama . Lagu religi	5.00%	0.00%
Acara penunjang / layanan masyarakat	. Obrolan santai . <i>Live report</i>	10.00%	10 %

Sumber: Proposal Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran *Hapsari FM*

Acara ini adalah sebuah program yang mendatangkan perempuan-perempuan serikat sebagai narasumber. Acara ini dipandu oleh seorang penyiar dan perempuan yang dijadikan narasumber adalah orang yang dapat bercerita tentang topik yang dipilih. Sebelum ditayangkan, pengelola akan meminta kepada serikat Hapsari untuk mengutus anggotanya yang dapat bercerita tentang suatu topik tertentu. Topik yang dipilih pun beragam, mulai dari yang membutuhkan pemahaman khusus seperti masalah feminisme atau sekadar cerita pengalaman berorganisasi dan lainnya. Narasumber yang mendatangkan berasal dari berbagai serikat yang ada di Sumatera Utara yang diundang secara bergilir.

2. **Beranda (Berani Bicara Beda)** yang disiarkan pada Selasa dan Jumat.

Acara Beranda adalah sebuah program yang menayangkan informasi seputar perempuan. Acara ini dibawa oleh seorang penyiar diselingi pemutaran lagu. Bahan yang dibacakan berasal dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang sedang diangkat. Topik acara beragam mulai dari permasalahan publik seperti perempuan berpolitik hingga masalah domestik seperti perceraian atau KDRT.

3. **Jejak Perempuan** yang mengudara pada Rabu dan Kamis.

Acara ini disiarkan dengan dipandu oleh seorang pembawa acara. Perempuan yang diangkat ceritanya adalah mereka yang dianggap cukup menginspirasi. Saat mengudara, tokoh yang diceritakan akan dihubungi melalui telepon sehingga dapat berbagi cerita dengan pendengar.

Dengan jam tayang 16 jam sehari dan 7 hari dalam sepekan, berarti *Hapsari FM* tayang sebanyak 112 jam selama seminggu. Sementara, program untuk penguatan perempuan hanya ada tiga mata acara yang masing-masing berdurasi satu jam dengan frekuensi penyiaran dua kali seminggu. Ini berarti hanya

6 jam setiap minggu acara penguatan perempuan yang ditayangkan secara rutin. Dengan perbandingan tersebut, maka tayangan di *Hapsari FM* yang mengandung pemberdayaan perempuan hanya sebesar 5,3%.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, manajemen SDM sangat mempengaruhi kualitas program acara radio komunitas. Oleh sebab itu, radio komunitas memang harus memberikan pelatihan kepada anggotanya agar isi siaran didominasi oleh informasi, bukannya acara hiburan. Manajemen SDM juga terkait dengan peran komunitas yang terlibat aktif di dalam dunia penyiaran.

Peran anggota komunitas merupakan salah satu permasalahan penting di banyak radio. Di satu sisi, komunitas memiliki kebutuhan terhadap radio, tetapi inisiatif dari komunitas, masih sangat kurang. Pada akhirnya, *spot* yang idealnya bisa diisi dengan informasi harus diganti dengan program hiburan. Padahal, Informasi adalah kekuatan dan menjadi indikator penting pemberdayaan perempuan. Ketika *Hapsari FM* merancang sebuah acara, yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana agar ada acara yang menampilkan perempuan-perempuan akar rumput yang tidak pernah mendapat kesempatan berbicara di media massa.

Apa yang terjadi di media massa *mainstream* selama ini adalah penyamarataan informasi. Hasilnya, masyarakat dipaksa untuk mendengarkan berita yang sebenarnya tidak membawa manfaat baginya. Programing yang memberdayakan adalah yang disesuaikan dengan kebutuhan pendengarnya. Radio komunitas perempuan umumnya memegang prinsip bahwa isi siaran mereka tidak harus memenuhi aturan standar media profesional. Sepanjang radio mampu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, maka aspek pemberdayaan seharusnya dapat dipenuhi oleh media tersebut. Dengan prinsip seperti itu, berbagai mata acara diciptakan dan dikreasikan supaya benar-benar menampung aspirasi kelompok perempuan, sehingga

kadangkala radio menjadi ajang curahan hati pendengarnya yang tidak pernah memiliki kesempatan bersuara di media *mainstream*.

Model siaran *Ngopi*, misalnya, adalah program di mana perempuan dapat bercerita tentang apa saja mengenai dirinya. Model penyiaran komunitas membiarkan para perempuan bicara tanpa sensor. Menurut Mitchell (dalam Jankowski dan Prehn, 2002), model penyiaran tanpa sensor ini merupakan medium alternatif yang penting karena berguna untuk mempromosikan ide, praktik, dan konten feminis, dan melawan apa yang disebut sebagai “pemusnahan simbolik” perempuan yang disebabkan oleh kurangnya atau kesalahan penggambaran perempuan oleh media.

Keberadaan radio *Hapsari FM* sebagai media curhat bagi perempuan, bukan saja memberi kesempatan pada perempuan untuk bercerita dari sudut pandang yang berbeda. Diskusi dan pemahaman yang lebih lanjut dapat membuat perempuan mampu mengenali siapa dirinya dan merasa nyaman sebagaimana adanya. Bertambahnya pengetahuan perempuan tentang hak-haknya ketika mendengar *Hapsari FM* merupakan satu nilai lebih yang tidak didapati dari radio komersil biasa.

Keunggulan lain media komunitas adalah kemampuannya untuk menjadi jembatan antara komunitas dengan para pemangku kepentingan. *Hapsari FM* memiliki potensi yang besar untuk mendorong terjadinya perubahan. Pertama, radio ini memiliki komunitas yang sudah teroganisir melalui serikat-serikat perempuan anggota Hapsari. Melalui serikat-serikat, pemetaan permasalahan perempuan di setiap daerah lebih mudah dilakukan. Selain itu, dengan masa kerja hampir 25 tahun, Hapsari sudah memiliki jaringan yang kuat di level kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Relasi Hapsari dapat dijadikan pintu masuk untuk menyelesaikan masalah-masalah kelompok perempuan secara nyata, misalnya tentang kesehatan reproduksi melalui kerja sama dengan instansi terkait.

Pola dari *on air* ke *off air* merupakan

kekuatan media komunitas. Banyak penyiaran komunitas yang awalnya hanya menyiarkan satu isu kemudian mencoba menyelesaikan masalah yang dibahas dalam tataran *real*. Itu pulalah sebabnya radio komunitas kegiatannya tidak selalu terbatas pada bidang penyiaran. Bahkan di level selanjutnya, radio komunitas dapat merambah ke isu-isu yang lain.

Tetapi untuk membuat programing acara *on air* ke *off air* dibutuhkan kemampuan SDM yang jumlah dan kapasitasnya terpenuhi. Inilah yang masih menjadi permasalahan pelik di *Hapsari FM*. Karena permasalahan SDM, bukan saja mengurangi kreativitas radio untuk menciptakan acara-acara yang menunjang pemberdayaan perempuan. Ada kalanya, acara yang sudah ditayangkan juga harus dihilangkan. Salah satu acara yang dulu ada, tetapi sekarang dihilangkan dari program *Hapsari FM* adalah *Suara Hati* yang disiarkan pukul 21:00-22:00 pada Kamis dan Minggu. Karena staf yang mengasuh acara ditarik ke Sekretariat Hapsari, program tersebut diganti menjadi Tembang Kenangan dengan alasan karena penyiar yang tersedia sudah tua-tua, dan yang mereka pahami serta senangi adalah lagu-lagu lama.

Relasi dengan Komunitas dan Stakeholder Lainnya

Ciri khas utama media komunitas adalah keterkaitannya dengan komunitas yang membangun media tersebut. Sudiby (2004) menyebutkan bahwa karakter dasar ini ditandai dengan hubungan langsung dan intensif di antara keduanya. Selain itu juga ditandai dengan partisipasi anggota komunitas dalam perencanaan program, produksi, pembiayaan, dan dalam mengevaluasi kinerja lembaga penyiaran.

Pada kasus *Hapsari FM*, yang dimaksud dengan komunitas adalah adanya identitas yang sama bisa karena ikatan minat, kepentingan, dan kepedulian terhadap hal yang sama. Kesamaan identitas sebagai kelompok perempuan adalah yang mengikat serikat anggota Hapsari sehingga dapat dianggap

sebagai komunitas dari radio tersebut. Fungsi *Hapsari FM* adalah sebagai wadah untuk menyampaikan ide-ide mereka yang selama ini jarang, bahkan tidak pernah disampaikan ke publik.

Di radio, para perempuan basis dilatih untuk bicara. Anggota serikat dimintai untuk berbagi pengalaman ataupun menjadi narasumber acara-acara *talkshow Hapsari FM*. Umpan balik akan muncul setelahnya. Pada pertemuan di serikat, mereka mendiskusikan tentang siaran yang mereka dengar. Di sini muncul kritik dan saran tentang bagaimana penampilan anggota mereka, entah dianggap terlalu kaku, ataupun masukan lainnya. Jika pada gilirannya, ada anggota lain yang diminta untuk bicara di radio, perempuan yang sudah berpengalaman, akan memotivasi sesama rekannya untuk juga berani, seperti dirinya, tampil di depan mikrofon radio.

Namun, partisipasi serikat anggota *Hapsari* tidak tampak dalam bidang manajemen dan penyiaran sehari-hari. Relasi radio dengan komunitas dijumpai oleh *Hapsari* sebagai organisasi payung bagi perempuan-perempuan anggota serikat. Dalam hal perencanaan, produksi, maupun evaluasi kegiatan radio pengelola hanya berkoordinasi dengan *Hapsari*. Relasi dengan komunitas juga berkaitan dengan akses terhadap radio. Sebagai radio komunitas, masalah jangkauan siaran kerap menjadi keluhan. Pada kasus *Hapsari FM*, hal itu harus mereka atasi dengan cara menambah kekuatan antena pemancar mereka melebihi batas ketentuan.

Posisi *Hapsari FM* di tengah-tengah kota Lubuk Pakam, membuat radio ini juga didengar oleh masyarakat di luar serikat anggota *Hapsari*. Para pendengar ini disebut fans. Para fans ini hanya aktif sebagai pendengar. Meskipun demikian, ada juga fans yang ikut aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan *Hapsari*, seperti diskusi, dll. Tetapi, fans radio ini belum dikelola dengan baik karena belum mendapat tempat dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif di radio.

Selain hubungan dengan para pen-

dengarnya, *Hapsari FM* juga menjalin relasi dengan beberapa lembaga yang dapat memberikan kontribusi terhadap radio tersebut. Salah satunya adalah KBR 68 H. Radio tersebut memang aktif merangkul radio-radio komunitas di Sumatera Utara, salah satunya *Hapsari FM*. Kerja sama di antara keduanya adalah dalam bentuk *relay* berita 68 H yang disiarkan oleh *Hapsari FM*. Bentuk lain kerja sama *Hapsari FM* dengan KBR 68 H adalah pelatihan-pelatihan tentang penyiaran radio yang diselenggarakan oleh KBR 68 H. Salah satu yang pernah mengikuti pelatihan tersebut adalah penanggung jawab *Hapsari FM*, Siti Khadijah.

Di tingkat kabupaten, *Hapsari FM* menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga pemerintahan. Salah satu yang pernah hadir dan menjadi narasumber di acara *talkshow* yang mereka adakan adalah Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Deli Serdang. Mengudaranya pejabat dari Badan KB dan PP sangat diapresiasi oleh para pendengar *Hapsari FM*. Mereka dapat menelepon dan menanyakan langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.

Yang juga memberikan kontribusi terhadap *Hapsari FM* adalah Kepolisian Resort Deli Serdang. Instansi ini secara berkesinambungan melibatkan *Hapsari FM* untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas. Jangkauan *Hapsari FM* yang mengkhususkan diri ke komunitas perempuan, justru membuat instansi kepolisian tersebut dapat membuat format pesan yang khusus disampaikan kepada kelompok perempuan.

Selain menyiarkan iklan layanan masyarakat, radio ini juga kerap mengikutsertakan pihak kepolisian dalam *talkshow* yang mengangkat tema tentang antikekerasan. Kerja sama mereka selama ini cukup efektif dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Pihak kepolisian mampu menjangkau pendengar perempuan, sementara *Hapsari FM* menggunakan suara kepolisian untuk meningkatkan daya dorong pesan yang

mereka sampaikan, terutama yang berkaitan dengan promosi anti-kekerasan terhadap perempuan.

Untuk melihat bagaimana konsep pemberdayaan diaplikasikan di dalam radio komunitas, yaitu dengan mengamati bagaimana komunitas terlibat di dalam radio tersebut. Akses adalah salah satu konsep vital di dalam radio komunitas. Dan di dalam konsep pemberdayaan itu sendiri, akses terhadap komunikasi juga merupakan salah satu elemen dari pemberdayaan (Amri dalam Nasir dkk, 2007).

Pada radio *Hapsari FM*, akses terhadap media dapat dinilai dengan dua sudut pandang yang berbeda. Jika hanya melihat partisipasi komunitas (anggota serikat Hapsari) dalam bidang manajemen dan penyiaran, radio ini dapat dianggap tertutup bagi anggota komunitas. Tetapi, ada model keterwakilan komunitas yang terwujud di dalam kepengurusan maupun pelaksana harian Hapsari, yang pada dasarnya menjalankan fungsi yang harusnya dilakukan oleh anggota komunitas.

Pada titik inilah, wakil komunitas (baik di DPN maupun di pelaksana harian) dapat menjalankan pengawasan dan mengevaluasi kerja radio. Sementara, di bidang penyiaran, ada kebijakan yang diterapkan oleh Hapsari untuk membatasi staf radio hanya untuk serikat anggota semata. Kebijakan ini, di satu sisi, menguntungkan bagi anggota serikat, tetapi di sisi lain, Hapsari tidak cukup akomodatif untuk membuka pintu selebar-lebarnya agar komunitas dapat aktif berperan di dalam penyelenggaraan siaran.

Di sisi komunitas, kemungkinan untuk memberikan kesempatan bagi anggota serikat berperan aktif di radio juga tidak terlalu diinginkan. SPI Deli Serdang misalnya, merasa bahwa untuk mengisi radio, mereka masih belum memiliki kapasitas. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan semangat radio komunitas yang tidak membutuhkan rancangan acara seperti *mainstream*.

Mendudukan masalah ini pada bing-

kai yang benar, memang tidak mudah. Peneliti melihat bahwa, baik pendiri, penyelenggara, maupun anggota komunitas, belum sepaham tentang radio komunitas.

Pendiri radio memiliki visi bahwa radio komunitas ini dapat menjadi tempat bagi apapun yang ingin disampaikan perempuan, tanpa harus melihat kualitasnya. Sepanjang itu memberikan perempuan akar rumput sebuah wadah untuk bersuara, maka suarakanlah. Di sisi penyelenggara, ada motivasi yang agak bergeser. Kemungkinan besar berasal dari kepenatan kerja dan kurangnya SDM sehingga keterlibatan komunitas yang dimaksud adalah untuk membantu meringankan kerja staf radio. Dari pihak komunitas, mereka melihat radio sebagai sesuatu yang sangat hebat, sehingga ada ketakutan untuk ikut ambil bagian di dalam penyiaran radio.

Di luar komunitas perempuan, *Hapsari FM* juga memiliki jaringan yang cukup kuat. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi penyelenggaraan siaran karena ada banyak lembaga yang dapat mendukung mereka. Dari sisi peningkatan kapasitas SDM, radio tersebut hanya memerlukan keinginan untuk berbenah dan melakukan evaluasi terhadap program-program mereka. Peneliti melihat bahwa ada stagnansi di tingkat pengelola. Seolah-olah, radio ini tidak lagi dapat ditingkatkan kualitasnya. Padahal, jika melihat relasi mereka dengan berbagai lembaga, *Hapsari FM* bisa jauh lebih maju. Tetapi pengelola cenderung melihat dari satu sisi saja, yaitu relasi yang dapat menghasilkan keuntungan finansial.

Jika dilihat dari berbagai lembaga yang sudah pernah bekerja sama dengan *Hapsari FM*, dapat diciptakan sebuah model advokasi yang mutakhir di mana pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui dorongan media komunitas. Hal ini sudah dilakukan dalam skala kecil. Misalnya jika ada *talkshow* yang mendatangkan pihak eksekutif maupun legislatif, anggota serikat diminta untuk mengirimkan sms atau menelepon ke radio.

Dari contoh di atas, ada peluang untuk menggunakan media lebih jauh lagi, yaitu

mendorong satu kebijakan yang memberdayakan perempuan. *Hapsari FM* sebagai media bagi perempuan akar rumput untuk bersuara juga berfungsi menjembatani antara masyarakat dan pemerintah. Dilihat dari segi komunikasi pembangunan, partisipasi masyarakat melalui media memiliki banyak dampak. Menurut Howley (2010) komunikasi partisipatoris yang dipraktikkan di media komunitas dapat meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, merangsang penyelesaian masalah yang kreatif, dan memupuk rasa bhineka tunggal ika. Inilah yang paling menjanjikan dari keberadaan media komunitas sehingga upaya untuk memajukan tumbuh kembangnya perlu dilakukan oleh berbagai pihak. Selain itu, radio komunitas seperti *Hapsari FM*, yang tersegmen pada isu perempuan memiliki potensi besar untuk mengakselerasi pemberdayaan perempuan di Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan paparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa radio komunitas mampu mendorong pemberdayaan perempuan karena beberapa hal. Pertama, dari aspek pendirian, keberadaan *Hapsari FM* merepresentasikan perjuangan perempuan dalam melawan ketidakadilan gender. Radio ini tidak sekadar proyek lembaga, tetapi benar-benar menjadi bagian integral dari organisasi perempuan desa. Gerakan perempuan desa yang terorganisir melalui *Hapsari* kemudian melahirkan radio komunitas perempuan. Jadi, melalui berdirinya radio *Hapsari FM*, perempuan menunjukkan kemampuannya membangun eksistensi diri.

Kedua, dari segi struktur kelembagaan, pengelolaan radio diberikan sepenuhnya kepada perempuan. Hal ini menjadikan perempuan sebagai pemegang keputusan yang dominan di radio tersebut. Selain itu, berkaryanya perempuan di bidang penyiaran tidak hanya mengekspresikan suara perempuan kepada publik, tetapi juga meningkatkan kapasitas perempuan itu sendiri.

Ketiga, selain di tataran organisasi,

bentuk pemberdayaan perempuan yang paling menonjol adalah program acara yang muncul di radio komunitas. Munculnya suara perempuan di media itu saja sudah merupakan bentuk perlawanan terhadap perilaku bias gender yang kerap terjadi di media *mainstream*. Melalui pengelolaan siaran yang melibatkan komunitas perempuan akar rumput, *Hapsari FM* menunjukkan bahwa ada tempat bagi perempuan untuk bersuara melalui radio komunitas. Dengan menyajikan topik-topik yang spesifik tentang perempuan, *Hapsari FM* memberikan alternatif siaran yang dapat memperkaya pengetahuan masyarakat umum dan perempuan pada khususnya.

Keempat, hubungan timbal balik antara radio dan komunitas menunjukkan bahwa misi pemberdayaan tidak bisa dilakukan hanya dari satu pihak. Studi kasus di *Hapsari FM* menunjukkan bahwa komunitas tidak saja menjadikan radio sebagai media komunikasi dan informasi. Yang paling utama bagi mereka adalah bahwa radio adalah tempat para perempuan desa dapat belajar berbicara di depan publik. Menjadi narasumber atau sekadar bertanya pada saat acara berlangsung di radio, merupakan sebuah langkah kecil di mana perempuan memiliki kemampuan untuk berbicara tanpa merasa rendah diri.

Namun, keberadaan radio *Hapsari FM* tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Dari internal radio, permasalahan terbesar adalah kualitas dan kuantitas SDM. Minimnya kualitas SDM mempengaruhi jumlah siaran radio yang bersifat pemberdayaan perempuan. Selain mempengaruhi jumlah siaran yang bersifat memberdayakan, minimnya kualitas SDM membuat radio ini tidak mampu memanfaatkan jaringan yang mereka miliki. Efek lanjutan dari masalah kualitas SDM tercermin di dalam struktur organisasi radio dan pemahaman pengelola tentang radio komunitas sangat terbatas, sehingga menganggap bahwa radio komunitas sama dengan radio komersial. Pemahaman itu mengakibatkan tingkat partisipasi warga komunitas

secara keseluruhan cenderung rendah.

Dari sisi eksternal, regulasi yang mengikat radio komunitas mengurangi gerak *Hapsari FM* dalam usaha pemberdayaan. Dari proses perizinan, terasa begitu panjang, membutuhkan dana banyak, dan memerlukan pendekatan personal dengan pihak KPID untuk mempermudah proses perizinan. Bahkan setelah proses perizinan selesaipun, pengelola radio komunitas masih dibebani biaya-biaya siluman untuk oknum KPID dan oknum dari Balai Monitoring Frekuensi setempat.

Dengan melihat praktik bermedia yang dilakukan oleh *Hapsari FM*, radio ini setidaknya telah memberikan ruang bagi perempuan untuk berbicara di depan publik. Hal ini memberikan alternatif siaran yang tidak bias gender sekaligus juga merupakan bentuk nyata perlawanan perempuan terhadap diskriminasi yang umum dilakukan oleh media *mainstream*.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Arie D., Endang, S. Indrawati, and Tri, P. Astuti. Hubungan antara Kemandirian dengan Sikap terhadap Kekerasan Suami pada Istri yang Bekerja di Kelurahan Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang dalam *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro*. Vol. 3, No. 1. Semarang: Journal of Psychology Faculty, 2006.
- Birowo, Mario A. *Community radio movement in Indonesia: a case study of Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (Yogyakarta Community Radio Networks)*, paper disajikan pada Media Asia Conference Curtin University of Technology, Perth, Australia, 29 November 2006.
- Boafo, Kwame, S. T (Ed). *Promoting Community Media in Africa*. Paris: Unesco, 2000.
- Darmanto, A. Kinerja Perizinan Radio Komunitas di Provinsi DIY dalam *Jurnal Iptek-Kom*, Vol. 11, No. 2. Yogyakarta: Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Yogyakarta, 2009.
- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publications, 1994.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Fleming, Carole. *The Radio Handbook*. Edisi 2. London: Routledge, 2002
- Fraser, Colin., and Sonia R. Estrada. *Community Radio Handbook*, Paris: Unesco, 2001.
- Giddens, Anthony. *Sociology*. Edisi 2. London: Blackwell Publishers, 1993.
- Hobson, Barbara, Jane Lewis, and Birte Siim (Eds) *Contested Concept in Gender and Social Politics*. London: Edward Elgar Publishing Limited, 2002.
- Howley, Kevin. *Understanding Community Media*, California: Sage, 2010.
- Ibrahim, Idi, S. dan Hanif Suranto (Eds), 1998, *Wanita dan Media: Konstruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jankowski, Nicholas W., and Ole Prehn (Eds). *Community Media in the Information Age*. New Jersey: Hampton Press, 2002.
- Mulia, Siti M. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*. Yogyakarta: Kibar Press, 2008.
- Nasir, Akhmad, dkk. *Media Rakyat, Mengorganisir Diri Melalui Informasi*. Yogyakarta: Combine Resource Institution, 2007.
- Proposal Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran *Hapsari FM*
- Rachmiatie, Atie. *Radio Komunitas: Eskalasi Demokratisasi Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007.
- Seneviratne, Kalinga *Peoples' Voices, Peoples' Empowerment*. Singapore: AMIC, 2012.
- Siregar, Ashadi, Rondang Pasaribu, and Ismay

- Prihastuti (Eds). *Eksplorasi Gender di Ranah Jurnalisme dan Hiburan*. Yogyakarta: Galang Printika, 2000.
- Sitompul, Parulian. Potensi Radio Komunitas Epiginosko dalam Pembangunan Masyarakat Pedagang Pasar Horas Kota Pematang Siantar Sumatera Utara dalam *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, Vol. 10, No. 1. Medan: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi Informatika Medan
- Sudibyo, Agus. *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Suranto, Hanif (Ed). *Dinamika Radio Komunitas*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2009.
- Suryochondro, Sukanti. *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1984.
- Tripambudi, Sigit. Radio Komunitas sebagai Media Alternatif untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 9, No. 3. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, 2011.
- Yin, Robert, K. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Sumber Internet

- AMARC Organisation. "Kebijakan Jender untuk Radio Komunitas" Diakses pada 25 Mei 2013. http://win.amarc.org/documents/GP4CR_Bahasa.pdf.
- Komnas Perempuan. "Profil Komnas Perempuan" Diakses pada 16 Juli 2013. <http://www.komnasperempuan.or.id/about/profil/>.

Keterangan :

Artikel ini merupakan bentuk pemadatan dari tesis dengan judul asli "Radio Komunitas dan Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus pada Radio Komunitas Perempuan *Hapsari FM* di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara)". Pembimbing tesis adalah Dr. Phil. Hermin Indah Wahyuni, M.Si. dan Wisnu Martha Adiputra, S.IP.,M.Si. Tesis tersebut sudah dipertahankan pada 9 Juli 2013 di hadapan Dewan Penguji: Drs. Budy K. Zaman, M.Si.; dan Muhamad Sulhan, S.IP.,M.Si.

Penelitian ini disponsori oleh *In Search in Balanca* (ISB) UGM dan UiA. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan sponsor.

antena, 129
Audit, 118
backing, 124
bhineka, 131
disk jockey, 126
eksternal, 121, 132
fellow Ashoka Foundation, 123
frekuensi, 117, 118, 123, 127
gender, 119, 121, 122, 123, 131, 132
Governance, 118
hapsari fm, 117, 118
ika, 131
internal, 121, 125, 131
jingle, 123, 125
live report, 125
mainstream, 118, 123, 127, 130, 131, 132
marginal, 118
observasi, 121
off air, 119, 128
on air, 119, 128
patriarkis, 122
radio komunitas, 117, 118, 119, 120, 121, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
reformasi, 118
regulasi, 117, 125, 132
School Broadcasting Media, 125
sensor, 128
spot, 127
stakeholder, 117, 120, 121
stakeholders, 118, 121
Tuah Suara Murni, 123
tunggal, 131